

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Samudera Hindia merupakan Samudera terbesar ketiga didunia yang wilayahnya 20 persen dari total lautan. Samudera Hindia juga merupakan lautan dengan luas yang mencapai 73,3 km³ dan memiliki sumber daya alam yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi di negara – negara yang berbatasan dengannya (Kanayev). Samudera Hindia merupakan satu – satunya Samudra yang diapit oleh 3 benua yaitu, benua Asia, benua Afrika, benua Australia serta Kutub selatan. Samudera hindia memiliki banyak keistimewaan dan letak yang sangat strategis sehingga memikat para negara – negara besar untuk berlomba – lomba menguasai kawasan samudera Hindia. Adapun Samudra Hindia merupakan wilayah yang strategis untuk dijadikan pusat perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Samudra hindia yang diapit oleh beberapa benua besar di dunia. Dan juga Samudra hindia memiliki simpanan cadangan minyak yang melimpah, yaitu sekitar 40 persen produksi total minyak dunia (Aljauhari, 2020)

Dari perspektif ekonomi, Samudra Hindia merupakan tujuan pasar lebih dari 2,5 miliar orang. Selain itu juga terdapat sekitar 30 negara yang mendapatkan pengaruh langsung dari potensi yang dimiliki oleh Samudera Hindia, serta beberapa negara yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan sumber daya Samudera Hindia. Tiga puluh negara yang mendapatkan pengaruh langsung dari samudera tersebut memiliki lokasi geografi yang begitu strategis yakni berada pada jalur perdagangan tersibuk dunia. Samudera Hindia selain kaya akan sumber daya alam juga menjadi jalur perdagangan dunia, keamanan, dan pemenuhan sumber daya laut bagi negaranegara pesisir kawasan samudera tersebut (Situmeang, 2019). Jika dijumlahkan, negara-negara pesisir Samudera Hindia menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, dan sekitar 40% perdagangan dunia melewati Samudera Hindia. Samudera Hindia menjadi media untuk sampainya minyak tersebut ke berbagai negara tujuan. Sekitar 200 kapal tangker pengangkut minyak perharinya melewati Selat Hormuz menuju eropa, Amerika dan Jepang. Kehidupan barat saat ini sangat bergantung dengan produksi minyak dari Timur. Sehingga, wilayah Teluk Persia memiliki peranan yang sangat vital bagi

kelangsungan masa depan dunia barat dimana sebanyak 70% jalur distribusi minyak dunia terletak di Samudera Hindia. Oleh sebab itu, gangguan keamanan yang muncul di kawasan tersebut dapat memicu meningkatnya harga minyak dan gas bumi dunia (Ayuningtyas, 2017).

Selain itu, Samudera Hindia juga kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya gas alam. Negara-negara pesisir Samudra Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia, 35% cadangan gas alam dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% deposit permata dan berbagai mineral lainnya. Samudera Hindia juga merupakan jalur internasional yang penting, dikenal sebagai persimpangan penting, dengan letak geografis yang sangat menguntungkan Fokus pada isu-isu ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan serta samudera hindia dikatakan strategis karena lokasi ibarat berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional. Sebagai contoh perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia akan selalu melewati wilayah Indonesia. Perdagangan tersebut melewati wilayah darat, laut, dan udara (Marginingsih, 2019).

Pada 2010, negara-negara Samudra Hindia memiliki populasi sekitar 2,49 miliar, terhitung 35,7% dari populasi dunia. Pada tahun 2030, populasi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 27%, meningkat 689 juta orang. Meskipun negara-negara di Samudra Hindia berada di lautan yang sama, mereka menunjukkan perbedaan yang jelas dalam politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, seperti Indeks Pembangunan Manusia yang dirumuskan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2011 (Statistik, 2007). Hubungan antara negara-negara Samudera Hindia terjalin oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi dan sejarah, melalui nelayan, pelaut dan pedagang yang berlayar melalui pelabuhan dan jalur perdagangan terbuka. Sejarah sebagai negara imperialis Secara tidak langsung membentuk identitas bersama. Hubungan antara negara-negara ini telah mengarah pada pertemuan regional sejak 1995. Salah satu nilai strategis Samudra Hindia adalah bahwa kawasan Samudra Hindia kaya akan sumber daya alam, yang mana minyak dan gas bumi menyumbang lebih dari dua pertiga dari total dunia cadangan minyak dunia. Ini memegang 35% dari cadangan gas 60% uranim, 40% emas, 80% deposit berlian dan berbagai zat lainnya. Nilai strategis lainnya hingga 70% kawasan Samudera Hindia digunakan sebagai jalur perdagangan

khususnya minyak dan gas, dan lebih dari separuh kapal kontainer dan tanker dunia melewati kawasan tersebut. Dengan demikian, sumber daya alam yang terdapat di Samudera Hindia dapat menimbulkan konflik antara negara yang dapat mengelola dan yang tidak. Dalam hal ini, konflik akan berdampak pada keamanan maritim di Samudera Hindia dan menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat perkembangannya perdagangan, salah satunya konflik yang timbul dari kejahatan transnasional atau transnational crime. Menurut keputusan PBB Kedelapan tahun 1990, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih, pelaku atau korbannya adalah warga negara asing, dan di luar wilayah satu negara atau lebih (Setiana, 2018).

Kejahatan transnasional merupakan perkembangan yang mencirikan bentuk kejahatan kontemporer yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir pada tahun 1970-an. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kompleksitas transnasional yang ada antara kejahatan terorganisir, dan korupsi, dan memiliki implikasi di tingkat internasional untuk hukum nasional dengan karakteristik berbahaya (Olii, 2005). Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian internasional saat ini adalah *piracy* atau pembajakan. Kejahatan transnasional ini merupakan ancaman di Indonesia di dunia internasional, karena tujuan yang dimaksudkan adalah agar kapal-kapal dagang dari berbagai negara melewati wilayah perairan dan laut lepas negara tersebut, maka dampak pembajakan akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas peradaban dunia serta dampaknya terhadap perdagangan internasional (Djumena, 2011). Pembajakan atau *piracy* merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan Samudera Hindia. Pembunuhan, penculikan dan penyanderaan. Pembajakan meningkat pada tahun 2010 dan 2011, merugikan ekonomi \$7 miliar. Insiden pembajakan di Samudera Hindia tahun 2017 terjadi di atas kapal tanker, yang secara resmi dikonfirmasi oleh pemerintah Somalia (Maruf, 2017).

Terdapat berbagai permasalahan di kawasan Samudera Hindia, salah satu contohnya adalah kejahatan transnasional yang menjadi perhatian internasional saat ini adalah *piracy* atau pembajakan. Kita perlu membangun pertahanan negara di Samudera Hindia, dan pembangunan pertahanan negara Indonesia di Samudera Hindia sangat diperlukan. Jika kemampuan dan kapabilitas kekuatan pertahanan dapat dikembangkan,

masalah keamanan yang mendesak dapat diatasi, karena kejahatan transnasional sering terjadi di Samudra Hindia, yang merupakan ancaman internasional karena kapal dagang dari berbagai negara diperkirakan akan melintasi wilayah tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan data World risk report 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, Indo Australia dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik atau *Pacific ring of fire* (Hermon, 2014). Kondisi ini kemudian menjadi penyebab terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Selain itu, secara hidroklimatologis Indonesia juga terdampak dengan adanya fenomena *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO) dan La Nina yang mana Fenomena El-Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu air laut di Samudra Pasifik sepanjang khatulistiwa secara drastis dari nilai rata-ratanya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan fenomena La-Nina adalah fenomena menurunnya suhu air laut di Samudra Pasifik sepanjang khatulistiwa sehingga berimbas pada terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung (Hasrul Hadi, 2019). Gempa bumi merupakan bencana alam yang cukup sering terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2009-2019) bencana alam gempa bumi telah terjadi sebanyak 216 kali dengan jumlah korban hilang dan meninggal dunia sebanyak 637 jiwa, 8.687 korban luka-luka, 459.855 pengungsi, 602.223 unit rumah warga rusak serta 131 fasilitas umum yang juga mengalami kerusakan (Devi Listiana, 2021).

Indonesia yang merupakan negara rawan bencana, pasti menghadapi bencana setiap saat atau pada waktu tertentu. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus memperhatikan keseluruhan perencanaan dan pertimbangan secara menyeluruh. (seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dll) sering terjadi. Bencana tersebut tidak hanya melanda Indonesia tetapi seluruh dunia. Di Indonesia, daerah rawan gempa/bencana (termasuk Aceh, Yogyakarta, Padang, Bengkulu, dan Papua) dikenal sebagai daerah rawan gempa. Penyebab daerah Aceh rawan bencana adalah disebabkan karena kondisi geologi dan geografi Aceh berada di jalur cincin api (ring of

fire) yang menyebabkan beberapa gunung api, dan zona subduksi menjadi pusat gempa bumi dan tsunami (Aceh, 2020). Penyebab daerah padang daerah yang rawan bencana disebabkan oleh Kota Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang Kondisi alamnya berupa perbukitan dan dataran rendah yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi ini membuat Kota Padang rentan terhadap bencana banjir dan cuaca ekstrim yang paling sering terjadi, serta bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi dan tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan kegagalan teknologi dan rawan terhadap bencana geologi lainnya (ppid.padang, 2021). Penyebab daerah papua rawan bencana disebabkan oleh Provinsi Papua sebagai wilayah paling timur dari Indonesia memiliki potensi bencana geologi yang cukup rawan. Bencana gempa bumi, longsor, dan banjir acap kali terjadi pada hampir semua Kabupaten di Provinsi Papua (DMC, 2022). Selain disebabkan oleh faktor alam atau tidak wajar, juga disebabkan oleh faktor manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, serta bencana yang disebabkan oleh faktor manusia seperti konflik sosial dan teror antar kelompok atau masyarakat.

Pemerintah daerah dalam hal ini ikut serta dalam tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, Perlindungan masyarakat dari dampak bencana, Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai (Putri, 2020). Namun tidak dapat disangkal peran penting negara, di mana pemerintah harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Kecuali untuk bencana (baik yang disebabkan oleh faktor alam atau tidak) Faktor alam maupun manusia), kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikologis, sangat mempengaruhi kesejahteraan warga. Akibat peristiwa tersebut, dampak bencana juga bersifat kompleks, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Tanggung jawab pemerintah sesuai dengan pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang mengharuskan: "Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Kesatuan melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan” (bphn, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Selatan. Batas kota Bengkulu juga telah diperbarui Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2013 tentang Batas Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Batas Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, maka Peraturan Provinsi Bengkulu Nomor Kota Bengkulu meliputi seluas 15.197,91 hektar. Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Sumatera, setelah Padang. Sebelumnya, wilayah ini dipengaruhi oleh Kerajaan Indrapurura dan Kesultanan Banten. Itu dikuasai oleh Inggris sebelum diserahkan ke Belanda. Kota ini juga pernah menjadi koloni hukuman bagi Bung Karno selama pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1939-1942. Secara astronomis Kota Bengkulu terletak antara 03°45' - 03°59' selatan dan 102°14' - 102°22' BT, dan batas wilayahnya meliputi batas utara dan timur. Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma di selatan, dan Samudera Hindia di barat. Medan Kota Bengkulu bergelombang dan terdiri dari dataran pantai dan daerah perbukitan, dengan daerah aliran sungai kecil di beberapa tempat. Di Bengkulu tahun 2015 curah hujan tertinggi 559 mm dengan 20 hari hujan dan Oktober minimal 7 mm dengan hanya 1 hari hujan (Perkotaan.bpiw, 2017).

Provinsi Bengkulu menerapkan Kebijakan Strategis Kondisi Ideal Provinsi Bengkulu, dilanjutkan dengan pengembangan kawasan perkotaan di Ibu Kota Provinsi Bengkulu untuk mengatasi permasalahan banjir dan kawasan industri untuk mengembangkan kawasan perkotaan. Sehingga dengan dibangunnya jalan tol, perkembangan pulau Baai dan kawasan, maka dinamika perekonomian Bengkulu akan semakin baik. Kawasan industri lainnya beberapa usulan pengembangan kawasan perkotaan telah diajukan ke pemerintah pusat terkait rencana mempercantik Kota Bengkulu. Hal itu sudah dibicarakan dengan dewan perwakilan rakyat DPR RI di Bengkulu dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga

wajah kota Bengkulu kedepannya akan lebih baik. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah Bengkulu akan membangun flyover misalnya di kawasan Persimpangan Polres Bengkulu dan dari Simpang Pagar Dewa ke Pulau Baai. Wilayah Kota Bengkulu pada umumnya terdiri dari sedimen permukaan Kuarter, batuan sedimen dan vulkanik, batuan terobosan Tersier. Batuan Tersier dan Kuarter diperoleh dengan membagi umur batuan menurut geologi. Batuan Tersier terbentuk 37-38 juta tahun yang lalu, dan batuan Kuarter terbentuk 0,01-1,8 juta tahun yang lalu. Kondisi permukaan di wilayah kota Bengkulu dapat dijelaskan oleh urutan stratigrafi. Stratigrafi adalah studi tentang sejarah, komposisi umur relatif, distribusi per lapisan tanah, dan interpretasi lapisan - lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah Bumi (Sakip.bengkulukota, 2019).

Provinsi Bengkulu berada pada jalur patahan sumatera adalah kabupaten kota yang termasuk rawan bencana gempa dan tsunami. Kondisi alam di kota Bengkulu yang secara geografis berada pada pesisir pantai pulau Sumatera menghadap barat daya Samudera Hindia. Kondisi kota Bengkulu saat ini berpotensi menyebabkan timbulnya resiko terjadinya beragam bencana yang dipicu oleh kejadian alam dan ulah manusia. Kota Bengkulu adalah salah satu dari enam puluh tujuh kelurahan yang rawan terhadap bencana. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil (Citra, 2012).

Letak Kota Bengkulu berada pada pertemuan lempeng tektonik Samudera Hindia dan lempeng tektonik Asia menyebabkan Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir sering dilanda gempa Tektonik (Stasiun Iklim Bengkulu, 2008). Gempa bumi sering melanda Bengkulu, dan pada tanggal 4 Juni 2000, gempa berkekuatan 8 skala richter menyebabkan bencana terbesar di Bengkulu. Menurut catatan sejarah, gempa bumi juga terjadi pada tahun 1833, 1914, 1940 dan 1980. Pada tahun 2007, Kota Bengkulu kembali mengalami gempa besar, yaitu 7,9 skala richter, dan pada tahun 2007 tercatat 61 gempa. Dilihat dari kondisi alamnya, perlu dipahami daerah-daerah bencana di Provinsi Bengkulu yang sering terjadi bencana alam. Mitigasi mengacu pada tindakan yang mengurangi bahaya untuk meminimalkan kerusakan. Mitigasi bencana meliputi kegiatan dan tindakan perlindungan yang dapat dimulai dalam bentuk persiapan pra bencana, penilaian bahaya

bencana, penanggulangan bencana, penyelamatan, pemulihan, dan relokasi (Stasiun Klimatologi Bengkulu, 2008).

Saat terjadi bencana alam masyarakat di daerah Bengkulu harus mewaspadai daerah bencana. Mitigasi mengacu pada tindakan yang mengurangi bahaya untuk meminimalkan kerusakan. Mitigasi bencana meliputi kegiatan dan tindakan perlindungan yang dapat dimulai dalam bentuk persiapan pra bencana, penilaian bahaya bencana, penanggulangan bencana, penyelamatan, pemulihan, dan relokasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik alam maupun buatan, terhadap masyarakat di daerah rawan bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kerugian jika terjadi bencana di masa depan dan mengurangi risiko kematian dan cedera pada penduduk, termasuk mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi pada infrastruktur sektor publik (Al-Amin, 2022).

Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga seluruh lapisan masyarakat perlu bersiap-siap menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah menyusun strategi jitu untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana, yaitu melalui relawan mitigasi bencana. Relawan penanggulangan bencana ini adalah relawan yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat Bengkulu dari bencana (APS, 2019). Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana termasuk pemerintah pusat dan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu sejauh mana regulasi terkait penanggulangan bencana diimplementasikan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penanggulangan bencana Indonesia dengan membuat rekomendasi kebijakan strategis dalam kegiatan penanggulangan bencana. nomor 24 tahun 2007 (bphn, 2007).

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dan Keppres RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, perlu

ditetapkan Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (JariUngu, 2017).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Bagaimana upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pembangunan fisik, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas menghadapi ancaman bencana. Sumatera Selatan masih lemah, ini disebabkan oleh patroli di Sumatera bagian selatan masih sangat lemah, ditambah dengan Pulau enggano di Provinsi Bengkulu, tidak bisa mendukungnya, dan kapal takut lewat. Makanan menjadi sulit didapat di Pulau enggano di provinsi Bengkulu setelah lebih dari tiga minggu, tanpa perahu yang ditambatkan di pulau itu karena gelombang tinggi dengan menggunakan pesawat Perintis yang lepas landas dari Bandara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, selain kelangkaan pangan, cuaca ekstrem yang membuat kapal tidak bisa berlabuh di pulau itu juga menghambat perekonomian warga setempat. Hal ini dikarenakan semua hasil pertanian dan perikanan penduduk pulau tersebut sudah membusuk dan tidak bernilai lagi karena tidak tersedia (Rahmadi, 2020). Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan jalur udara. Pembangunan Pangkalan Udara TNI AL (lanudal) sangat penting karena dengan dibangunnya lanudal tujuannya untuk memperkuat pertahanan dan selain memperkuat pertahanan perencanaan pembangunan lanudal di Bengkulu untuk membantu proses penanganan korban bencana alam dan mempercepat distribusi logistik bagi korban maupun pembangunan infrastruktur yang rusak sebagai dampak dari bencana alam serta untuk memperhatikan bagian perairan sumatera bagian barat yang mana untuk melindungi pulau terluar di provinsi Bengkulu seperti pulau enggano. Sejauh ini daerah Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 525 KM dari ujung Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko, serta pulau-pulau terluar, seperti Pulau enggano yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pembangunan fisik berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan bagaimana peningkatan kesadaran dan kapasitas menghadapi ancaman bencana serta sinergitas dari pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam membangun lanudal di kota Bengkulu untuk mendukung pertahanan Negara di samudera hindia. Poin-poin penting ini perlu bersinergi agar pembangunan Kota Bengkulu ke depan semakin baik. Menurut Rohidin

Mersyah untuk membangun sistem drainase perkotaan terkait dengan kondisi jalan, baik perkotaan, provinsi maupun nasional, termasuk yang terkait dengan pengendalian izin perumahan bersubsidi, telah banyak datang di kota, terutama mengingat izin memiliki Ikuti aturan mereka untuk menghindari banjir (APS, 2019). Daerah resapan tidak ada, sistem drainase tidak dibangun, ruang hijau belum siap, sehingga banyak masalah banjir di kawasan pemukiman. Diserahkan ke pemerintah provinsi tanpa verifikasi yang tepat (FHD, 2022).

Dr.H. Rohidin Mersyah bersama tim Puspenerbal TNI AL di ruang rapat lantai tiga Pemprov Bengkulu membahas rencana pembangunan lanudal Hal ini disampaikan oleh Gubernur Rohidin usai menggelar rapat bersama Tim Puspenerbal TNI Angkatan Laut (AL) di ruang rapat lantai III pemprov Bengkulu (APS, 2020) Ini bakal membuat dinamikasi ekonomi dan keamanan Bengkulu akan menjadi semakin baik. Menurut gubernur kesepuluh Bengkulu, panjang garis pantai Bengkulu adalah 525 kilometer mulai dari Kabupaten Kaur hingga ke ujung Kabupaten Mukomuko dan keberadaan pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan dikembangkannya Bandara Fatmawati Soerkano menjadi bandara internasional oleh PT. Angkasa Pura II tentunya hal ini juga membutuhkan pengamanan yang lebih, sehingga sangat tepat waktu untuk TNI AL juga berencana membangun pangkalan udara di kawasan lapangan terbang. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak PT. Angkasa pura II. Karena ini terkait dengan rencana pembangunan bandara secara keseluruhan. Termasuk infrastruktur yang sudah dirancang. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai status aset tanah dan rencana pengembangan Lanudal yang membutuhkan lahan seluas 6 hektar di kawasan bandara.

Sementara itu, Kicky Salvachdie, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Indonesia (Dirrenbang Puspenerbal) mempertimbangkan pendirian Pangkalan Udara TNI AL di Bengkulu Salah satunya untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh dari sisi barat perairan Sumatera (Samudera Hindia), yang lainnya adalah memberikan dukungan logistik untuk TNI AL, khususnya pesawat udara TNI angkatan Laut (PESUD TNI AL). Ketiga, mendukung penguatan keamanan bandara. Keempat, menciptakan rasa aman bagi masyarakat Sumatera Barat

khususnya Bengkulu sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelima, membantu mengatasi bencana alam dan menyediakan logistik dan evakuasi medis bagi korban bencana (APS, 2020).

Dari pemerintah pusat sudah saat nya memikirkan akan permasalahan yang ada dengan melakukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan lanudal di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kebijakan Tentara Nasional Indonesia peraturan kepala staf angkatan laut undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang organisasi dan tugas pusat penerbangan tentara nasional Indonesia angkatan laut yang terdapat pada pasal 1 yaitu pusat penerbangan tentara nasional Indonesia angkatan laut yang selanjutnya disebut puspenerbal adalah badan pelaksana pusat TNI angkatan laut yang berkedudukan langsung dibawah kasal, pasal 2 yaitu puspenerbal bertugas membina kekuatan penerbangan TNI angkatan laut yang meliputi pengintaian maritim, anti kapal selam, anti kapal permukaan, pendaratan pasukan pendarat lintas helikopter, dukungan logistic cepat, pengamanan laut, menyelenggarakan fungsi dukungan pesawat udara, pembinaan material dan personel penerbangan TNI angkatan laut sebagai sub sistem senjata armada terpadu (SSAT) dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut (AL, 2022). Dengan melihat peraturan dari TNI angkatan laut di pasal 2 sudah dijelaskan yang mana ini berhubungan dengan pertahanan Negara di bagian barat provinsi Bengkulu yang tugas dari lanudal diantaranya untuk logistic cepat, pengamanan laut, menyelenggarakan fungsi dukungan pesawat udara, pembinaan material dan personel penerbangan TNI angkatan laut sebagai sub sistem senjata armada terpadu (SSAT) dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui permasalahan Sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu dalam pembangunan pangkalan udara tentara nasional Indonesia angkatan laut di kota Bengkulu untuk mendukung pertahanan Negara di bagian barat provinsi Bengkulu. Mengingat potensi ancaman dan pentingnya pembangunan lanudal di kota Bengkulu. Dengan topik bahasan “Sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah Bengkulu Dalam Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Untuk Mendukung Pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu”

1.2 Fokus dan Sub Fokus

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adalah sinergitas pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk Mendukung Pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu.

1.2.2 Sub Fokus penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan fokus penelitian. Berangkat dari fokus penelitian di atas, penelitian ini merumuskan sub fokus penelitian yaitu Bagaimana upaya perencanaan pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan upaya pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam mendukung pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu.

1.3 Rumusan Masalah

Pentingnya mendirikan pangkalan udara di Kota Bengkulu, karena Provinsi Bengkulu dikenal sebagai provinsi yang rawan bencana. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat perlu bersiap untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pertahanan di pulau Sumatera bagian selatan masih lemah, ditambah patroli di Sumatera bagian selatan masih lemah, dan dengan keberadaan Pulau terluar yang dimiliki oleh provinsi Bengkulu yaitu pulau enggano yang mana jika musim barat tidak bisa mendukung dikarenakan gelombang naik dan kapal bisa untuk melawati daerah tersebut. Dengan melihat permasalahan yang ada untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara yang paling efisien adalah dengan menggunakan jalur udara. Pembangunan lanudal di provinsi Bengkulu sangat penting karena dengan dibangunnya lanudal di provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan selain memperkuat pertahanan perencanaan pembangunan lanudal di Bengkulu untuk membantu proses penanganan korban bencana alam dan mempercepat distribusi logistik bagi korban maupun pembangunan infrastruktur yang rusak sebagai dampak dari bencana alam serta untuk memperhatikan bagian perairan sumatera bagian barat yang mana untuk melindungi pulau terluar di provinsi Bengkulu seperti pulau enggano. Seperti diketahui bersama, Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 525 kilometer dari

puncak Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko, serta pulau-pulau terluar seperti Pulau Engano yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Sehubungan dengan deskripsi yang telah di sampaikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergitas pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam pembangunan pangkalan udara tentara nasional indonesia angkatan laut untuk mendukung pertahanan negara di bagian barat provinsi Bengkulu.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah Bengkulu dalam Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk Mendukung Pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Bengkulu Dalam perencanaan Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Untuk Mendukung Pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah Bengkulu Dalam Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk Mendukung Pertahanan Negara di Bagian Barat Provinsi Bengkulu.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Bengkulu Dalam perencanaan Pembangunan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia di Bagian Barat Provinsi Bengkulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelengkap dan pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memperkaya perpustakaan referensi bidang

pertahanan. Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk mendukung serta meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan serta memperkaya referensi perpustakaan bidang pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yaitu terkait strategi Pertahanan Laut dengan menggunakan teori teori yang di gunakan di bab II maka di harapkan memberikan manfaat khususnya pada aspek sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pangkalan udara militer guna mendukung pertahanan negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagaimana diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan perencanaan pembangunan lanudal di provinsi Bengkulu untuk mendukung pertahanan Negara di bagian barat provinsi Bengkulu. Dan Penelitian ini berguna terhadap stake holder yang mana dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah Bengkulu yang berguna bagi :

a. Pemerintah Bengkulu

Pemerintah Bengkulu dalam pembangunan pangkalan udara tentara nasional Indonesia angkatan laut di provinsi Bengkulu berguna untuk keamanan masyarakat Bengkulu dan pertahanan di provinsi Bengkulu serta untuk mendukung pertahanan Negara di bagian barat provinsi Bengkulu.

b. TNI AL

Dalam pembangunan pangkalan udara tentara nasional Indonesia angkatan laut di provinsi Bengkulu untuk pengawasan patroli udara yang membuat efektivitas dan efisien tugas pengawasan TNI AL melalui patroli udara TNI AL.

c. Berguna bagi Universitas Pertahanan RI

Untuk mengembangkan materi pengajaran, untuk mendukung meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

